Digital Repository Universitas Jember

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006-2017

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Arif Bashro

140810101023

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

Digital Repository Universitas Jember

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006-2017

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Muhammad Arif Bashro

140810101023

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sahama dan Ayahanda Moh. Saleh Hairuddin tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Kakak yang tersayang M. Khoirul Hasan yang selalu memberikan semangat, cinta dan canda tawanya;
3. Guru-guru sekolahku dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"

(Terjemahan QS. Al – Insyirah, 6-8)

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan mebawamu ke Surga”

(Imam Hasan Al-Bashri)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alva Edison)

“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow”

(Albert Einstein)

“Bahagia itu sederhana. Mensyukuri, mencintai, dan menjaga apa yang kita miliki”

(Muhammad Arif Bashro)

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Bashro

NIM : 140810101023

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Judul Skripsi : KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006-2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 September 2018

Yang menyatakan,

Muhammad Arif Bashro

NIM 140810101023

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006-2017

Oleh :

Muhammad Arif Bashro
NIM 140810101023

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Riniati, M.P

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si

Digital Repository Universitas Jember

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (PAD) KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006-2017
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Arif Bashro
NIM	:	140810101023
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi	:	Ekonomi Regional
Disetujui Tanggal	:	17 Juli 2018

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Riniati, M.P	Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si
NIP. 195608311984031002	NIP. 195312251984031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin. M.Kes

NIP. 196411081989022001

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Judul Skripsi

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006-2017

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Arif Bashro

NIM : 140810101023

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

20 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Agus Luthfi, M.Si 196505221990021001 (……..)
2. Sekertaris : Dr. Moh. Adenan, MM 196610311992031001 (……...)
3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani, M.Si 196101221987022002 (……...)

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

Digital Repository Universitas Jember

Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember Tahun 2006-2017

Muhammad Arif Bashro

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, dan kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan time series, data yang digunakan berupa time series tahun 2006-2017 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Jember, Badan Pendapatan Daerah dan jurnal sebagai pendukung. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Efektifitas, Analisis Efisiensi, dan Analisis Kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, efektifitas retribusi terminal di Kabupaten Jember sudah efektif dengan rata-rata hasilnya 98,52% dari tahun 2006-2017, dan efiensi retribusi terminal menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi terminal di Kabupaten Jember sangat efisien terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Jember dikategorikan sangat kurang, kecilnya kontribusi retribusi terminal menunjukkan bahwa penerimaan retribusi terminal belum menjadi sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah. Perlu adanya pengelolaan secara sistematis dalam peningkatan penerimaan retribusi terminal.

Kata kunci : Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah, Jember

Digital Repository Universitas Jember

Contribution of Terminal Retribution to Local Original Income (PAD) In Jember Regency Year 2006-2017

Muhammad Arif Bashro

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business,
University of Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness, efficiency, and contribution of terminal charges to revenue (PAD) in Jember. This research is descriptive quantitative research using time series data used in the form of time series in 2006-2017 Local Revenue Jember. Data used in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Jember, Jember Transportation Department, Board of Revenue and the journal as a supporter. The analytical method used is Analysis Effectiveness, Efficiency Analysis, and Analysis Contributions,The results showed that the effectiveness of terminal charges in Jember has been effective with the average result is 98.52% of the year 2006 to 2017, and the efficiency of terminal charges shows that the implementation of terminal charges in Jember very efficient against the original income.Contributions retribution terminal in Jember district is categorized as very less, the small contribution of retribution retribution terminal indicates that the terminal has not become the main source of local revenue. It needs a systematic management of the increasing acceptance of terminal charges.

Keywords: Retribution Terminal, PAD, Jember

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember Tahun 2006-2017; Muhammad Arif Bashro; 140810101023; 2018; halaman; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Pemerintah daerah harus memaksimalkan sumber penerimaan untuk dapat membiayai rumah tangga dan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Jember, retribusi terminal merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam retribusi daerah dan apabila dimaksimalkan akan mampu mendorong kenaikan PAD. Dengan kondisi geografis Kabupaten Jember adalah perbukitan dan penduduknya menyebar jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi daerah, maka mobilitas penduduk dirasa sangat penting dalam aktivitas kegiatan ekonomi penduduknya. Pengukuran pendapatan dari adanya mobilitas tersebut dapat diukur melalui penerimaan retribusi terminal Kabupaten Jember. Dari data yang sudah ada terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal tidak selalu mencapai target ditiap tahunnya, perkembangan penerimaan retribusi terminal dan PAD selama dua belas tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PAD yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kontribusi retribusi terminal terhadap tingkat PAD di Kabupaten Jember seta untuk mengukur efektivitas kontribusi retribusi terminal di Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember. Objek pada penelitian ini adalah Terminal Tawang Alun Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis

Digital Repository Universitas Jember

deskriptif kuantatif. Pada penelitian ini penulis akan mencoba menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menjawab permasalahan yang ada, untuk menghitung efektifitas, efisiensi, serta kontribusi retribusi terminal terhadap PAD Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan Instansi lain yang terkait. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis kontribusi, dan analisis efektivitas serta analisis efisiensi. 1). Hasil analisis kontribusi menunjukkan tingkat kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember dapat masih kurang dan tergolong kecil, dengan rata-rata 0,37% dari tahun 2006-2017. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi terminal setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. 2). Tingkat efektivitas retribusi terminal di Kabupaten Jember di kategorikan efektif dengan rata-rata 98,52% dari tahun 2006-2017. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Jember sudah cukup baik, karena sebagaian besar realisasi penerimaan retribusi terminal sudah hampir mencapai target yang telah direncanakan. 3). Tingkat efisiensi retribusi terminal menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi terminal di Kabupaten Jember sangat efisien terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana tingkat efisiensi retribusi terminal dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 bervariasi antara 5,40% sampai dengan 34,29%, dan rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 10,40% tiap tahunnya. ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi terminal selama tahun 2006-2017 sebesar 10,40% dari total realisasi penerimaan retribusi terminal selama tahun 2006-2017. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Jember khususnya UPT Terminal Tawang Alun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dikatakan sangat efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal selama tahun 2006-2017, karena persentase efisiensinya lebih kecil dari sembilan puluh persen.

Digital Repository Universitas Jember

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Sektor Basis dan Daya Saing Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Timur" Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Riniati, M.P. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Aisah Jumiati, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingnannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Dr. Sebastiana Viphindaratin, M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Ibunda Sahama dan Ayahanda Moh. Saleh Hairuddin yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa, terima kasih yang tak terhingga

Digital Repository Universitas Jember

ananda ucapkan atas beribu doa setiap waktu, kasih sayang, kerja keras tanpa mengenal waktu beserta kelelahannya, perhatian yang melebihi apapun, serta semua pengorbanan yang telah dilakukan untuk memberikan penghidupan yang layak dan terbaik kepada ananda. Terima kasih atas segala pengorbanan serta kasih sayang tak terhingga dan yang belum bisa ananda balas hingga saat ini. Maaf jika ananda masih belum bisa membahagiakan bapak dan ibu. Terima kasih untuk selalu tersenyum dan tetaplah sehat untuk mendampingi ananda hingga mampu menggapai cita dan kesuksesan di masa depan;

8. M. Khoirul Hasan selaku kakak kandung beserta keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan, doa setiap waktu dan semangat;
9. Putry Kuzaifah selaku kakak ipar beserta keluarga besar yang telah memberi dukungan, doa setiap waktu dan semangat;
10. Rekan-rekan terbaik penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2014 Hadiatullah, Muhlizul Amry, Rudi Hartono, Wahyudi, Eli Fatul Laili, Zainur Rosi, Kharisma Kurnia Budiawan, Indah A. Rozidah, Syafqur Iqbal, Dimas Sa'bandianto, Bagus Andriyanto terimakasih atas motivasinya, semangat, pendengar keluh kesah, kenangan dan canda tawanya;
11. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2014 dan teman-teman konsentrasi regional angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas *sharing* pengetahuan dan kebersamaannya selama ini;
12. Teman-teman satu atap di perantauan Gilang Firmansyah, terimakasih atas segala waktu untuk berkeluh kesah selama di Jember;
13. Teman Dekatku Intan Aprillia Nudin telah menjadi *partner* dan sahabat yang telah menemani dan membantu serta selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasinya;
14. Teman-teman peserta KKN 94 Desa Gebangan Kec. Kapongan Kab. Situbondo terima kasih sudah memberikan pelajaran hidup yang berharga setelah satu atap selama 45 hari;

Digital Repository Universitas Jember

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritikdan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 24 September 2018

Muhammad Arif Bashro
NIM. 140810101023

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERNYATAAN v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI vii
HALAMAN PENGESAHAN viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
RINGKASAN xi
PRAKATA xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 8
2.1.1. Pendapatan Nasional 8
2.1.2. Pengertian Otonomi Daerah 14

Digital Repository Universitas Jember

2.1.3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 16
2.1.4. Kriterian Penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....18
2.1.5. Pengertian Retribusi Daerah 19
2.1.6. Jenis Retribusi Daerah.....23
2.1.7. Subjek dan Objek Retribusi Daerah.....23
2.1.8. Retribusi Terminal 26
2.1.9. Efektifitas 29
2.1.10. Efisiensi.....30
2.1.11. Kontribusi 32
2.2. Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....32
2.3. Kerangka Konseptual.....37
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1. Rancangan Penelitian 38
3.1.1 Jenis Penelitian.....38
3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....38
3.1.3 Jenis dan Sumber Data.....38
3.2. Metode Analisis Data.....39
3.2.1. Analisis Kontribusi 39
3.2.2. Analisis Efektifitas.....40
3.2.3. Analisis Efisiensi 41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....42
4.1.1 Kondisi dan Letak Keadaan Geografis Kabupaten Jember 42
4.1.2 Gambaran Umum Kondisi Terminal di Kabupaten Jember 46
4.2 Analisis Data.....50
4.2.1 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD.....50
4.2.2 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah.....52
4.2.3 Efektifitas Retribusi Terminal.....55
4.2.4 Efisiensi Retribusi Terminal 56
4.3 Pembahasan.....58
4.3.1 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah ..58

Digital Repository Universitas Jember

4.3.2 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah.....59
4.3.3 Efektivitas Retribusi Terminal Terahadap Pendapatan Asli Daerah 59
4.3.4 Efisiensi Retribusi Terminal Terahadap Pendapatan Asli Daerah....60
BAB 5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan.....62
5.2 Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN.....69

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

1.1 Penerimaan Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006-2017 5
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 35
4.1 Jumlah Kendaraan Angkutan Kota Terminal Tawang Alun Jember 47
4.2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal 49
4.3 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD Tahun 2006-2017 50
4.4 Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2006-2017 53
4.5 Efektifitas Retribusi Terminal Tahun 2006-2017 55
4.6 Efisiensi Retribusi Terminal Tahun 2006-2017 57

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual 37
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Jember 42

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD Tahun 2006-2017 70
Lampiran 2. Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2006-2017.....72
Lampiran 2. Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal.....74
Lampiran 3. Efesiensi Penerimaan Retribusi Terminal.....76

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Gomies dan Pattiasina dalam Nugroho, 2014).

Di era reformasi, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar, yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta telah berupaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, yaitu di terapkannya sistem pemerintahan yang demokratis, dilaksanakan desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi kepada daerah-daerah. Untuk mengelolah dan mengatur pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditunjuk untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan

Digital Repository Universitas Jember

pemerintahan untuk mewujudkan cita- cita masyarakat yang lebih adil dan makmur (Sarundajang dalam Leonard, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 8, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam menggerakan pemerintahan tentunya daerah otonom harus mempunyai anggaran rumah tangga dengan cara memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerah otonom. Pemerintah daerah haruslah kreatif, inovatif, dan efektif dalam mengolah setiap sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Membicarakan retribusi terminal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah berarti kita juga membicarakan sistem pemerintahan daerah yang memungkinkan daerah otonom memungut retribusi terminal. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai perwujudan sistem desentralisasi, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keaneka-ragaman daerah. Dalam penyelengaraan Otonomi Daerah, diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara porporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keaneka-ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus memaksimalkan sumber penerimaan untuk dapat membiayai rumah tangga dan pembangunan daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi

Digital Repository Universitas Jember

Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah" (Warsito, 2001:128). Menurut UU No.33 Tahun 2004 pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah beserta hasil perusahan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya yang dipisahkan. Dalam hal ini penulis lebih mengfokuskan penelitian ini kepada Retribusi Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perijinan tertentu. Salah satu bidang yang harus dioptimalkan dan selalu ditinjau pengembangan fasilitasnya yaitu retribusi terminal yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Kemudian Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 ayat 1 dan 2 Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Diantara sumber-sumber penerimaan asli daerah, pajak daerah

Digital Repository Universitas Jember

dan retribusi daerah diharapkan lebih berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemeritah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Sedangkan efisien merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah (Halim dalam Puspitasari, 2014).

Di Kabupaten Jember, retribusi terminal merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam retribusi daerah dan apabila dimaksimalkan akan mampu mendorong kenaikan PAD. Dengan kondisi geografis Kabupaten Jember adalah perbukitan dan penduduknya menyebar jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi daerah, maka mobilitas penduduk dirasa sangat penting dalam aktivitas kegiatan ekonomi penduduknya. Pengukuran pendapatan dari adanya mobilitas tersebut dapat diukur melalui penerimaan retribusi terminal Kabupaten Jember. Dari data yang sudah ada terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi terminal tidak selalu mencapai target ditiap tahunnya, perkembangan penerimaan retribusi terminal dan PAD selama dua belas tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006-2017

Tahun Anggaran	Target Retribusi Terminal	Realisasi Retribusi Terminal	Pendapatan Asli Daerah
2006	700.000.000,00	631.148.000,00	66.951.656.315,33
2007	630.000.000,00	630.080.300,00	89.304.961.627,39
2008	630.000.000,00	614.416.050,00	136.524.604.267,28
2009	630.000.000,00	634.819.700,00	146.549.194.836,27
2010	700.000.000,00	668.521.650,00	153.780.905.393,43
2011	649.724.800,00	623.419.050,00	182.797.340.158,79
2012	725.000.000,00	866.546.600,00	255.804.203.083,72
2013	835.000.000,00	814.543.500,00	308.387.728.004,68
2014	835.000.000,00	819.571.500,00	441 605 617 222,69
2015	835.000.000,00	751.699.000,00	462.457.671.769,93
2016	835.000.000,00	745.212.500,00	524 955 111 848,96
2017	60.300.000,00	65.029.000,00	719.105.671.347,78

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, data diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat selama dua belas tahun terakhir bahwa masih banyak yang tingkat realisasi retribusi terminal tidak mencapai target yang telah dibuat pemerintah daerah Kabupaten Jember. Sedangkan hanya empat tahun yang melampaui target yaitu tahun 2007, 2009, 2012, dan 2017, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PAD yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal. Penerimaan daerah dari retribusi harus terus ditingkatkan sebagai sumber yang kontribusinya cukup berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dalam usaha peningkatan tersebut tentunya terdapat adanya berbagai hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan instansi lain yang terkait dan yang terpenting adalah dari masyarakat Kabupaten Jember .

Di Kabupaten Jember sendiri terdapat tiga terminal yang bisa menjadi asal tujuan perjalanan, yakni Terminal Tawangalun, Pakusari, dan Arjasa. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada terminal tawang alun dikarenakan Terminal bus Tawang Alun merupakan terminal utama yang melayani jalur Surabaya-Jember-Banyuwangi (lewat Tanggul), Surabaya-Jember-Banyuwangi (lewat Kencong-Balung dan atau Ambulu) yang juga melewati kota Lumajang.

Digital Repository Universitas Jember

Terminal ini juga melayani jalur Bus Patas (cepat terbatas) Jember-Yogya, Jember-Surabaya, Jember-Malang, serta Jember-Denpasar, dapat disimpulkan bahwa di terminal tawang alun memiliki jumlah retribusi terminal terbesar dibandingkan dengan terminal lainnya dikabupaten jember.

Memandang Retribusi daerah sebagai instrumen PAD yang potensial bagi suatu daerah. Maka untuk mengetahui apakah retribusi daerah benar mampu mempengaruhi PAD dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat, namun mampu mengoptimalkan segala sumber-sumber pembiayaan yang ada termasuk retribusi daerah itu sendiri guna pelaksanaan desentralisasi secara mandiri sesuai penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga penelitian ini diberi judul ”Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Jember Tahun 2006-2017 (Studi Pada Terminal Tawang Alun Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, maka adapun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara kontribusi retribusi terminal terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember?
2. Apakah ada pengaruh antara kontribusi retribusi terminal terhadap tingkat Retribusi Daerah di Kabupaten Jember?
3. Seberapa besar efektivitas kontibusi retribusi terminal di Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember?
4. Seberapa besar efisiensi kontribusi retribusi terminal di Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengukur pengaruh kontribusi retribusi terminal terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember

Digital Repository Universitas Jember

2. Untuk mengukur pengaruh antara kontribusi retribusi terminal terhadap tingkat Retribusi Daerah di Kabupaten Jember
3. Untuk mengukur efektivitas kontribusi retribusi terminal di Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember
4. Untuk mengukur efisiensi kontribusi retribusi terminal di Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintahan daerah

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten jember.

2. Bagi penelitian selanjutnya

   Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya dalam kaitannya dengan penerimaan daerah.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai. Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara di masa mendatang (Sukirno, 2008).

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa

Digital Repository Universitas Jember

dalam suatu tahun tertentu. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional bruto dan pendapatan domestic bruto.

Konsep Pendapatan Nasional

Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor atau disebut juga dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2006, p6), meliputi faktor produksi milik warga negaranya sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut.

Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut atau disebut juga dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut (Sukirno, 2008, p35).

Digital Repository Universitas Jember

Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

Digital Repository Universitas Jember

Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Penghitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X − M).

Digital Repository Universitas Jember

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100%

g = tingkat pertumbuhan ekonomi

PDBs = PDB riil tahun sekarang

PDBk = PDB riil tahun kemarin

Tiga metode yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional

1. **Cara Pengeluaran**

Digunakan di negara-negara maju, seperti Belanda, Inggris, Jerman dan Amerika Serikat, dimana pendapatan nasional yang dihasilkan metode ini dapat memberi gambaran tentang sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai dimana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi (Sukirno, 2008, p37).

2. **Cara Produk Neto**

Produk neto dapat diartikan sebagai nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi (Sukirno, 2008, p42). Sehingga perhitungan pendapatan nasional dengan cara neto diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian negara tersebut. Cara ini dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian negara.

3. **Cara Pendapatan**

Pendapatan nasional dengan cara pendapatan diperoleh dari penjumlahan pendapatan-pendapatan yang terjadi, akibat penggunaan faktor produksi untuk mewujudkan barang dan jasa. Pendapatan tersebut digolongkan menjadi pendapatan para pekerja (gaji/upah), pendapatan dari usaha perseorangan, pendapatan dari sewa, bunga neto dan keuntungan perusahaan.

Manfaat Perhitungan Pendapatan Negara atau Nasional

Digital Repository Universitas Jember

Bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa.

Faktor yang memengaruhi Pendapatan Nasional

Permintaan dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Konsumsi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional (pendapatan nasional), yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional (pendapatan nasional) dan menambah pengangguran.

Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan tabungan (saving) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat

Digital Repository Universitas Jember

erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.

Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat.

2.1.2 Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Menurut Smith (dalam Puspitasari, 2014) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu:

1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.

Digital Repository Universitas Jember

2. Untuk menciptakan *local accountability,* artinya dengan ekonomi akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak- hak masyarakat.
3. Untuk menciptakan *local responsiveness,* artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Secara konseptual, Indonesia berlandaskan pada tiga tujuan utama meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah, sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Anggaran merupakan variabel penting dalam mendukung kualitas kinerja pemerintah, mencerminkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah. Karena itu anggaran sebagai satu di antara indikator penting untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro di daerah, maka format anggaran mesti disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan obyektif. Format anggaran yang disusun berdasarkan penghitungan yang tidak realistis berakibat pada pemborosan keuangan daerah. Sebab itu pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek pemerintahan yang harus dikelola secara hati-hati. Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang dalam periode tertentu. Dengan demikian, anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. Anggaran daerah tersebut disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi instrumen utama kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas dan

Digital Repository Universitas Jember

efektivitas pemerintahan daerah. Sebagai alat ukur bagi pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah, APBD sangat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran, pengembangan ukuran-ukuran untuk evaluasi kinerja pemerintah. Selain itu, APBD merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk meniotivasi para pegawai dan alat bagi semua unit kerja dalam mengkoordinasikan semua aktivitas (Mardiasmo, 2002)

Dalam konteks efisiensi dan efektivitas anggaran, maka pemanfaatan anggaran secara sederhana dapat dikatakan bertujuan untuk memberikan efek kepada peningkatan kualitas layanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal yang menjadi kepentinganmasyarakatpada umumnya. Untuk meningkatkan pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anqqaran, maka penetapan anggaran didasarkan atas:

2. Tujuan dan sasaran yang jelas, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
3. Prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Melalui dua prinsip efektitas dan efiensi anggaran di atas, maka kesalahan alokasi dan penentuan jenis kegiatan atau proyek yang dibiayai oleh anggaran akan dapat ditekan seminimal mungkin dan mampu meningkatkan rasa tanggungjawabdari pelaksana operasional pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.1.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2002:39) adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang- Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang

Digital Repository Universitas Jember

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu:

a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah.
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Abdul Halim (2004:94) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala sumber keuangan yang berasal dari PAD memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah. Daerah memiliki kewenangan yang amat besar untuk mengelola sumber daya yang ada agar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Josef Riwu Kaho (2003:143) disebutkan sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Perusahaan daerah.
4. Dinas daerah.
5. Pendapatan daerah lainnya.

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
   a. Hasil Pajak Daerah
   b. Hasil Retribusi Daerah
   c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan, yaitu:
   a. Dana Bagi Hasil

Digital Repository Universitas Jember

b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus

3. Pinjaman Daerah, yaitu:
   a. Pemerintah
   b. Pemerintah Daerah
   c. Lembaga Keuangan Daerah
   d. Lembaga Bukan Keuangan Daerah
   e. Masyarakat
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Antara lain: hibah dan pendapatan dana darurat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk membiayai daerahnya.

2.1.4 Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul (dalam Subekti, 2011) kriteria penilaian PAD meliputi:

1. Kriteria hasil (*yield*) yaitu :
   a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
   b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil.
   c. Elastisitas hasil pajak/retribusi terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
   d. Perbandingan hasil pajak/retribusi dengan biaya pungut.
2. Kriteria keadilan (*Equity*) dasar dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang :
   a. Pajak/retribusi harus adil secara horizontal artinya beban pajak/retribusi harus sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
   b. Harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.

Digital Repository Universitas Jember

c. Pajak/retribusi harus adil dari tempat ke tempat artinya tidak terdapat perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam menyerahkan beban pajak/retribusi dari satu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Kriteria daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*). Pendapatan asli daerah hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai konsumen dan produsen menjadi segan bekerja untuk memperkecil beban lebih pajak/retribusi.
4. Kriteria kemampuan melaksanakan (*Ability To Implement*). Suatu pajak/retribusi harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability As A Local Revenue Souice*). Harus jelas di daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan dan pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak/retribusi.

2.1.5 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah sumber pokok daerah disamping pajak yang memiliki potensi cukup besar bagi kas daerah. Retribusi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara umum retribusi daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan tersebut bersifat ekonomis karena yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut (Riwu, 2003:17). Definisi tersebut mengartikan retribusi sebagai pembayaran atas jasa kepada negara yang dilakukan oleh pengguna jasa. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

Digital Repository Universitas Jember

fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam konteks daerah, retribusi tidak hanya pembayaran jasa tetapi juga berkaitan dengan pembayaran atas pemberian izin. Ahmad (dalam Subekti, 2011) menyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Panitia Nasrum (dalam Riwu, 2003:170) menjelaskan secara spesifik bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Ada dua karakteristik yang penting dalam retribusi menurut (Adolf Waqner C.Goedhart, 1973) yaitu:

1. Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.
2. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Disamping itu ada beberapa pengertian tentang retribusi, yaitu:

1. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Halim, 2002).
2. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2002).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari beberapa pendapat tentang retribusi daerah dapat diketahui beberapa ciri pokok retribusi daerah yaitu :

1) Retribusi dipungut oleh daerah.

Digital Repository Universitas Jember

2) Retribusi dikenakan kepada mereka yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masayarakat.

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu :

a. Retribusi yang sifatnya umum

   Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.

b. Retribusi yang pungutannya bertujuan

   Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

Sesuai dengan UU No 18 tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan sangat selektif, Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan

Digital Repository Universitas Jember

retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Retribusi daerah mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sektor penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, dimana pos-pos penerimaan retribusi dapat ditentukan sebanyak mungkin selama pemerintah daerah menyediakan jasa atas retribusi, dengan mempertimbangkan kelayakan objek retribusi berdasarkan nilai sosial ekonomi. Artinya, penerimaan sektor retribusi akan dapat optimal apabila pemerintah daerah mampu menggalinya. Keunggulan utama retribusi adalah pemungutannya yang berdasarkan pada kontraprestasi. Pembatasan utama terhadap retribusi terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa itu tersebut (Josef dalam Subekti, 2011). Berdasarkan hal tersebut maka retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau institusi.

2.1.6 Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan pasal 5 peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan

Digital Repository Universitas Jember

tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jens retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi daerah di bagi menjadi 3 golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001).

2.1.7 Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:56) seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, subjek retribusi daerah meliputi:

1. Subjek Retribusi Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Digital Repository Universitas Jember

2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Sedangkan objek Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani (2002:56) seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, meliputi :

a. Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum meliputi : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Objek retribusi jasa usaha meliputi : retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
c. Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau

Digital Repository Universitas Jember

fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelayanan yang termasuk retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dll.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 ada 3 objek retribusi daerah, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 140 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis retribusi. Tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

Digital Repository Universitas Jember

keuntungan yang layak sebagaimana diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2.1.8 Retribusi Terminal

Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan model angkutan. Pengelolaan retribusi terminal sangat diperlukan dalam memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan terminal angkutan penumpang dan fasilitas terminal lainnya.

Retribusi terminal memiliki beberapa dasar hukum, yaitu :

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
3. Keputusan Menteri perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
4. Peraturan Daerah (untuk Kab/ Kota).

Menurut Syaripuddin (dalam Sudarsono. 2015) retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/barang dengan kendaraan umum. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa :

Digital Repository Universitas Jember

1. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum.
2. Tempat Kegiatan Usaha.
3. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkut kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa. Adapun tingkat tarif yang dikenakan retribusi yaitu semua jenis angkutan dikenakan tarif Rp. 2000/mobil.

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 131 ayat 1 dan 2 Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Dalam hal ini pada jasa pelayanan terminal terdiri dari :

1. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
2. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan.
3. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang.
4. Jasa penggunaan kios.
5. Tempat penjualan tiket/karcis.
6. Ruang tunggu penumpang.
7. Tanda pengenal : pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus.
8. Jasa pemasangan reklame.
9. Jasa kebersihan.

Digital Repository Universitas Jember

Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, dijelaskan tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan terminal sebagai berikut:

1. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
2. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
3. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
4. Tempat Tunggu Kendaraan Umum, adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
5. Tempat Istirahat Kendaraan, adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
6. Tempat Tunggu Penumpang, adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
7. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Tipe Terminal Penumpang terdiri dari :

a. Terminal Penumpang Tipe A : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan”.

Digital Repository Universitas Jember

b. Terminal Penumpang Tipe B : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan”.
c. Terminal Penumpang Tipe C : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan”.

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal, terdapat tata cara sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kendala dalam pemumutan retribusi terminal adalah dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal. Pihak terminal menemui beberapa hambatan yang mengakibatkan pemungutan berjalan kurang baik, diantaranya:

1. Bus yang masuk ke terminal banyak berkurang sehingga berkurang pula penerimaan pungutan retribusi.
2. Semakin banyaknya kendaraan.
3. Cuaca Buruk yang menyebabkan banjir sehingga mengakibatkan bus jarang beroperasi.
4. Penunggakan pembayaran sewa kios, loket penjualan tiket oleh penyewa.
5. Kurangnya kesadaran pengguna jasa terminal untuk membayar retribusi.
6. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan strategi pemungutan sehingga pemasukan terhadap retribusi terminal bisa meningkat.

2.1.9 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon (dalam Puspitasari, 2014)

Digital Repository Universitas Jember

efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif.

Menurut (Handoko, 1989) bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seorang pengelola arsip dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan pengertian diatas, (Siagian, 1997) mengemukakan bahwa efektivitas berarti perbandingan yang positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang dipergunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang tepat pada waktunya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian juga (Atmosudirjo, 1982) mengemukakan bahwa efektivitas itu berarti semua jabatan dan unit harus secara nyata menjalankan fungsinya masing-masing. Selain itu menurut (Handayaningrat, 1990) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti dicapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapula pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan ouput yang diharapkan dari sejumlah input. Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

2.1.10 Efisiensi

Kata efisien berasal dari bahasa latin efficere yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987:3) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Malayu (dalam Puspitasari, 2014) yaitu efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan)

Digital Repository Universitas Jember

dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber- sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Di dalam Adiwarman A. Karim (2006), dibahasakan bahwa ”Efficient is doing the things right”, yang berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ada juga Halim (2004) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan.

Di dalam teori ekonomi, ada dua konsep umum mengenai efisiensi, yakni efisiensi yang ditinjau dari konsep ekonomi (*economic concept*) dan efisiensi yang ditinjau dari konsep produksi (*production concept*). Efisiensi yang ditinjau dengan konsep ekonomi mempunyai cakupan lebih luas yang ditinjau dari segi makro, sementara itu efisiensi dari sudut pandang produksi melihat dari sudut pandang mikro. Menurut Wikipedia Indonesia, efisiensi dalam konsep ekonomi merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada penggunaan, pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Penggunaan sumber-sumber daya bisa dikatakan efisien apabila:

a. Seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenuhnya digunakan.
b. Corak penggunaannya adalah sudah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi corak penggunaan lain yang akan memberikan tambahan kemakmuran bagi masyarakat/individu.

Digital Repository Universitas Jember

2.1.11 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi (Guritno dalam Priyono, 2009) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Halim, 2004) Kontribusi Retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat juga di katakan Kontribusi retribusi terminal yaitu sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk memebantu membuat sesuatu yang sukses.

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh Dhian Pratita Mayasari (2005) yang berjudul Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 1999-2003. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal Kabupaten Gunung Kidul masih kecil dan masih perlu untuk di tingkatkan lagi, begitu pula dengan tingkat upaya retribusi terminalnya. Sedangkan efektifitas sudah bisa digolongkan pada kinerja pemungutan retribusi terminal yang efektif dan untuk efisiensi, digolongkan pada pemungutan retribusi terminal yang sangat efisien. Hasil analisis trend, menunjukkan akan terjadi kenaikan retribusi terminal tiap tahunnya.

Penelitian oleh Gatot Priyono (2009) yang berjudul Kontribusi Pemungutan Retribusi Terminal Di Terminal Tirtonadi Terhadap Penerimaan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2005-2008. Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat hasil penelitian, penulis merekomendasikan agar pemerintah mengambil beberapa tindakan tegas terhadap pengguna terminal yang tidak mematuhi peraturan tersebut, dan untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku kepada pengguna terminal agar sesuai dengan peraturan terminal tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

Penelitian oleh Yuliana Subekti (2011) yang berjudul Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur (Studi Pada Dinas Perhubkominfo Kabupaten Lampung Timur). Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur belum maksimal. Merujuk pada indikator perencanaan yaitu terdapat realisasi retribusi terminal pada tahun 2010 yang tidak mencapai target.

Peneliatian oleh Elfayang Rizky Ayu Puspitasari (2014) yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.

Penelitian oleh R. Agoes Kamaroellah (2014) yang berjudul Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan". Hasil penelitian ini diketahui Retribusi Pasar di Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2011-2014 dinilai sangat efektif karena sudah melebihi dari nilai rata-rata 100%, dan in-efisien selama empat tahun sebab tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan Retribusi Pasar. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat dikatakan sangat baik karena pada tahun 2011 -2014 lebih dari 100,00% atau realisasi Retribusi Pasar lebih besar

Digital Repository Universitas Jember

dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, dengan demikian secara keseluruhan sudah mencapai target yang sudah ditetapkan.

Penelitian oleh Novia Cynthia Maradesa (2016) yang berjudul "Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud". Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011 kurang efektif, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan, pada tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dan berada pada kategori "sangat efektif" karena melampaui target yang telah ditentukan, namun menurun lagi pada tahun 2015. Kontribsi retribusi terminal terhadap PAD pada tahun 2011-2015 sangatlah kecil selama 5 tahun terkahir ini.

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dhian (2005)	Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 1999-2003	Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi retribusi terminal Kabupaten Gunungkidul masih kecil dan masih perlu untuk di tingkatkan lagi, begitu pula dengan tingkat upaya retribusi terminalnya. Sedangkan efektifitas sudah bisa digolongkan pada kinerja pemungutan retribusi terminal yang efektif dan untuk efisiensi digolongkan pada pemungutan retribusi terminal yang sangat efisien.
2.	Gatot (2009)	Kontribusi Pemungutan Retribusi Terminal Di Terminal Tirtonadi Terhadap Penerimaan Asli Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2005-2008	Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah perlu mengambil beberapa tindakan tegas terhadap pengguna terminal yang tidak mematuhi peraturan tersebut, dan untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku kepada pengguna terminal agar sesuai dengan peraturan terminal tersebut.
3.	Yuliana (2011)	Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur	Pengelolaan Retribusi Terminal dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal	Hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur belum maksimal. Merujuk pada indikator perencanaan yaitu terdapat realisasi retribusi terminal pada tahun 2010 yang tidak mencapai target.

Digital Repository Universitas Jember

4.	Elfayang (2014)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013	Pajak, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah	1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora kurang berkontribusi, namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.
5.	Agoes (2014)	Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan	Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian diketahui Retribusi Pasar di Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2011-2014 dinilai sangat efektif dan in-efisien selama empat tahun sebab tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan Retribusi Pasar. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah sudah mencapai target yang sudah ditetapkan.
6.	Novia (2016)	Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud	Retribusi Terminal dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifita penerimaan retribusi terminal pada tahun 2011 kuran efektif, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan, pad tahun 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 201 mengalami kenaikan dan berada pada kategori "sanga efektif" karena melampaui target yang telah ditentukar namun menurun lagi pada tahun 2015. Kontribsi retribus terminal terhadap PAD pada tahun 2011-2015 sangatla kecil selama 5 tahun terkahir ini.

Digital Repository Universitas Jember

2.3 Kerangka Konseptual

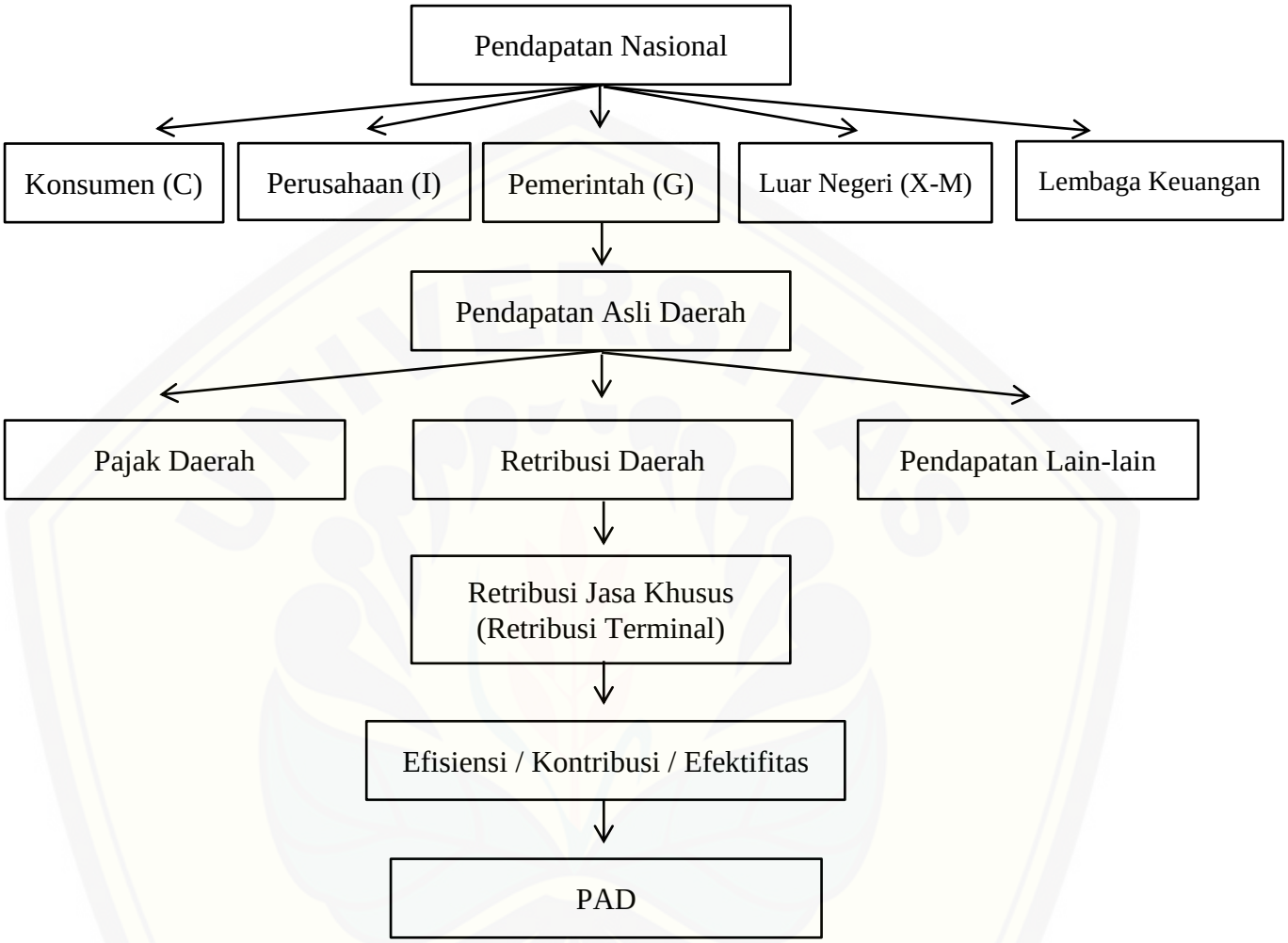

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Data diolah

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kuantatif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa. Dalam hal ini menggambarkan dan menafsirkan efektivitas penerimaan retribusi terminal dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pada penelitian ini penulis akan mencoba menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menjawab permasalahan yang ada, untuk menghitung efektifitas, efisiensi, serta kontribusi retribusi terminal terhadap PAD Kabupaten Jember.

3.1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, dan Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan berdasarkan data pada tahun 2006-2017.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu data diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan Instansi lain yang terkait.

Digital Repository Universitas Jember

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Kontribusi

Dengan menggunakan analisis kontribusi ini, dapat diketahui berapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi terminal terhadap PAD. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi terminal terhadap PAD digunakan formulasi sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \; x\; 100\%$$

P_n : Kontribusi penerimaan retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah

QX : Total penerimaan Retribusi Terminal

QY : Total penerimaan Pendapatan Asli Daerah

n : Tahun (periode) tertentu

Dengan memakai analisis kontribusi , maka akan mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan membandingkan hasil analisis tersebut dan sesuai data yang ada yaitu selama lima tahun, akan diperoleh hasil analisis yang bervariasi yang menunjukkan kenaikan dan atau penurunan, kontribusi juga dapat diketahui pula kontribusi yang terbesar dan kontribusi yang terkecil.

Kenaikan kontribusi Retribusi Terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah akan mampu mendorong peningkatan PAD dan bila sebaliknya maka juga akan menurunkan PAD. Sehingga bisa dibuktikan bahwa peranan Retribusi Terminal dalam meningkatkan PAD akan sesuai dengan kontribusinya, maka dengan begitu perlu dilakukan peningkatan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui Retribusi Terminal.

Untuk mengetahui klasifikasi dari kontribusi retribusi terminal digunakan pembagian sebagai berikut (Depdagri dalam Dasril , 2004) :

a. Rasio 0,00% - 10,00% (sangat kurang)

b. Rasio 10,10% - 20,00% (kurang)

Digital Repository Universitas Jember

c. Rasio 20,10% - 30,00% (sedang)

d. Rasio 30,10% - 40,00% (cukup)

e. Rasio 40,10% - 50,00% (baik)

f. Rasio < 50,00% (sangat baik)

3.2.2 Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas digunakan untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Toduho dalam Pelealu, 2016). Analisis efektifitas dilakukan dengan mengukur tingkat kinerja yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang diterima dengan target yang ditetapkan. Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

Pengukuran efektifitas dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalarn mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode pengukuran tingkat efektifitas yang merupakan perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi dengan penerimaan target retribusi yang ditetapkan. Bila diformulasikan dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Terminal}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Terminal}\ x\ 100\%$$

Efektifitas ini menyangkut semua tahap dalam administrasi penerimaan retribusi yaitu menentukan wajib retribusi, menetapkan tarif, memungut retribusi dan membukukan penerimaan (Ahmad dalam Dhian, 2005). Apabila nilai hasil pehitungan efektifitas mendekati 100% atau dengan kata lain semakin besar, maka retribusi terminal dapat dianggap semakin efektif, dan apabila sebaliknya, maka dapat dianggap semakin tidak efektif. Efektifitas ini akan dibandingkan dengan efektifitas pada tahun-tahun sebelumnya sehingga, dapat diketahui penerimaan retribusi terminal apakah sudah mencapai hasil efektifitas sesuai atau tidak dengan target yang sudah ditentukan.

Digital Repository Universitas Jember

Untuk mengetahui klasifikasi rasio dari Efektifitas retribusi terminal digunakan pembagian sebagai berikut (Depdagri dalam Pratama, 2017) :

a. Rasio > 100% (Sangat Efektif)
b. 91 s.d. 100% (Efektif)
c. 80 s.d. 90% (Cukup Efektif)
d. 61 s.d. 79% (Kurang Efektif)
e. < 60% (Tidak efektif)

3.2.3 Analisis Efisiensi

Efisiensi ini mengukur bagian dari hasil retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi yang bersangkutan (Ahmad dalam Pratita, 2005). Efisiensi retribusi terminal berkaitan dengan besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi terminal itu sendiri. Besarnya efisiensi retribusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Retribusi\ Terminal}{Realisasi\ Peerimaan\ Retribusi\ Terminal}\ x\ 100\%$$

Semakin kecil biaya pemungutan retribusi terminal terhadap realisasi penerimaan retribusi terminal berarti pemungutan retribusi terminal semakin efisien. Dengan kata lain, apabila hasil yang semakin efisien nilai yang diperoleh dari perhitungan efisiensi menunjukkan presentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila hasil perhitungannya semakin besar berarti semakin tidak efisien (Fitriyah dalam Pratita, 2005).

Untuk mengetahui klasifikasi rasio dari Efisiensi retribusi terminal digunakan pembagian sebagai berikut (Depdagri dalam Pratama, 2017) :

a. < 60% (Sangat Efisien)
b. 61 s.d. 79% (Efisien)
c. 80 s.d. 90% (Cukup Efisien)
d. 91 s.d. 100% (Kurang Efisien)
e. > 100% (Tidak efisien)

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal di Kabupaten Jember, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi retribusi terminal terhadap PAD tahun 2007-2017 mengalami fluktuasi. Hasil analisis kontribusi menunjukkan tingkat kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember masih tergolong kecil, dengan rata-rata 0,37% dari tahun 2006-2017. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi terminal setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan dalam setiap tahunnya
2. Tingkat efektivitas retribusi terminal di Kabupaten Jember di kategorikan efektif dengan rata-rata 98,52% dari tahun 2006-2017. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Jember sudah cukup baik, karena sebagaian besar realisasi penerimaan retribusi terminal sudah hampir mencapai target yang telah direncanakan.
3. Tingkat efisiensi retribusi terminal menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi terminal di Kabupaten Jember sangat efisien terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana tingkat efisiensi retribusi terminal dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 bervariasi antara 5,40% sampai dengan 34,29%, dan rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 10,40% tiap tahunnya. ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi terminal selama tahun 2006-2017 sebesar 10,40% dari total realisasi penerimaan retribusi terminal selama tahun 2006-2017. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Jember khususnya UPT Terminal Tawang Alun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dikatakan sangat efisien dalam merealisasikan penerimaan

Digital Repository Universitas Jember

retribusi terminal selama tahun 2006-2017, karena persentase efisiensinya lebih kecil dari sembilan puluh persen.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jember khususnya UPT Terminal Tawang Alun dan Dinas Perhubungan diharapkan dapat mempertahankan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi terminal yang sudah efektif dan efisien.
2. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi terminal, meningkatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dengan mengadakan penyuluhan. Dan perlu dilakukannya perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi terminal dapat berkembang seiring perkembangan perekonomian.
3. Pimpinan daerah lebih memperhatikan fasilitas yang ada, dan perlu adanya pembangunan fasilitas yang wajib untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika seperti Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, pos-pos pengawasan LLAJ, pos pengawasan angkutan laut, khususnya pembangunan Terminal Angkutan Darat serta fasilitas-fasilitas yang ada di Ibu Kota Kabupaten Kepulauan maupun di kota-kota strategis yang menjadi pusat perdagangan.
4. Perlu adanya penambahan alokasi dana untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan retribusi yang lebih efektif.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Wagner C. Goedhart, (Terjemahan Ratmoko, SH) (1973), Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Penerbit Jambatan.

Ali, Utsman. 2015. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Diambil dari : http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html (6 Maret 2018)

Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Kesekretarisan dan Administrasi. Jakarta. CV Telaga Bening.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember. http://surabaya.bpk.go.id/?page_id=8190. Diakses Pada Hari jum'at 27 April 2018 Pukul 09.22 WIB

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2012-2017. Jember

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Diakses dari https://jemberkab.bps.go.id/

Bupati Jember. 2012. Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal. Pemda Jember. Jember

Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, lnvestasi, dan Desentralisasi*. Kemitraan, Jakarta.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. 2010. *Data Terminal dan Profit Terminal Tawang Alun Kabupaten Jember.* Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Ersita, Mega, dan Inggriani Elim. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara.* Universitas Sam Ratulangi

Hakim, Vita Amaliah. 2013. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi

Digital Repository Universitas Jember

Halim, Abdul. 2002, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 1990. Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen.. CV Haji Masagung. Jakarta.

Handoko, T. Hani . 1989. Organisasi Perusahaan : Teori, Struktur, dan Perilaku, BPFE, Yogyakarta.

Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan.* Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Kamaroellah, R. Agoes. 2014. *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.* STAIN Pamekasan.

Karim, Adiwarman. 2006. Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?, Edisi 3*, Erlangga, Jakarta.

Kurniawan, Panca, dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Banyu Media Publising, Malang

Leonard, L. Langi, Daicy F.J Lengkong, BurhanuddinKiyai. 2016. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas SamRatulangi

Maradesa, Novia, Jenny Morasa, dan Lidya M. Mawikere. 2016. *Analisis Efektivitas Retribusi Terminal terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud*. Universitas Sam Ratulangi Manado

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Andi Yogyakarta.

Mulyamah. 1987. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Yudhistira

Mustika, Winda Ayu. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kota Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Digital Repository Universitas Jember

Nugroho, Adi. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Universitas Dian Nuswantoro

Oktari, Asti. 2016. Pengaruh Tingkat Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pelealu, Alfa Subiakto, dan Hendrik Manossoh. 2016. "Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung". Universitas Sam Ratulangi Manado

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemda Jember. Jember

Pratama, Wahyu Doni. 2017. Analisis Kontribusi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon Tahun 2007-2016. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Pratita Mayasari , Dhian. 2005. *analisis kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gunungkidul tahun 1999-2003.* Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Priyono, Gatot. 2009. Kontribusi Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Tirtonadi Terhadap Penerimaan Asli Daerah Di Kota Surakarta. Universitas Sebelas Maret

Puspitasari, Elfayang. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Universitas Diponegoro Semarang.

Risdiana, Santi. 2015. Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Parkir. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Riwu Kaho, Josef. 1982. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Bina Aksara. Jakarta

Riwu Kaho, Josef. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Reublik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Romadhona, Marisa. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Retribusi Terminal Penumpang di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014. Universitas Jember

Saksono, Prasetyo Budi. 1984. *Pengertian Efektifitas*. Jakarta. Gramedia

Digital Repository Universitas Jember

Siagian, Sondang P. 1997. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta. PT. Gunung Agung

Siahaan, P. Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Subekti, Yuliana. 2011. Pengelolaan Retribusi Terminal untuk meningkatkan realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur. Universitas Lampung

Sudarsono. 2015. "Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Regional Daya (TRD) Kota Makassar". Universitas Hasanuddin

Sulistyono, Sonya, Jojok Widodo S, dan Wisnu Hariadi. 2016. Analisis Tarif Angkutan Umum Kota Jember Berdasarkan Biaya Operasi Kendaraan (Bok) Dan Pendapatan. Jember

Suparmoko, 1994. Keuangan Negara. BPFE UGM, Yogyakarta.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.

Sutopo, Ariesto Hadi, dan Adrianus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada Media Group.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Sumber – Sumber Penerimaan Daerah.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Warsito, 2001. *Hukum Pajak.* Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada

Wikepedia. *Efisiensi Ekonomi*. https://id.m.wikepedia.org/wiki/Efisiensi_ekonomi. Diakses pada jumat 13 juli 2018

Wikipedia. *Otonomi Daerah.* https://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah. Diakses pada 9 Januari 2018

Digital Repository Universitas Jember

Wikipedia. *Kabupaten Jember*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember Diakses pada kamis 26 April 2018

Wikipedia. *Pendapatan Nasional*. wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional. Diakses pada kamis 26 April 2018

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap PAD Tahun 2006-2017

Tahun Anggaran	Retribusi Terminal (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2006	631.148.000,00	66.951.656.315,33	0,94
2007	630.080.300,00	89.304.961.627,39	0,71
2008	614.416.050,00	136.524.604.267,28	0,45
2009	634.819.700,00	146.549.194.836,27	0,43
2010	668.521.650,00	153.780.905.393,43	0,43
2011	623.419.050,00	182.797.340.158,79	0,34
2012	866.546.600,00	255.804.203.083,72	0,34
2013	814.543.500,00	308.387.728.004,68	0,26
2014	819.571.500,00	441.605.617.222,69	0,19
2015	751.699.000,00	462.457.671.769,93	0,16
2016	745.212.500,00	524.955.111.848,96	0,14
2017	65.029.000,00	719.105.671.347,78	0,01

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \; x\; 100\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{631.148.000,00}{66.951.656.315,33} \; x\; 100\% = 0,94$$

$$\text{Tahun 2007} = \frac{630.080.300,00}{89.304.961.627,39} \; x\; 100\% = 0,71$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{614.416.050,00}{136.524.604.267,28} \; x\; 100\% = 0,45$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{634.819.700,00}{146.549.194.836,27} \; x\; 100\% = 0,43$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{668.521.650,00}{153.780.905.393,43} \; x\; 100\% = 0,43$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{623.419.050,00}{182.797.340.158,79} \; x\; 100\% = 0,34$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{866.546.600,00}{255.804.203.083,72} \; x\; 100\% = 0,34$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{814.543.500,00}{308.387.728.004,68} \; x\; 100\% = 0,26$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{819.571.500,00}{441\ 605\ 617\ 222,69} \; x\; 100\% = 0,19$$

Digital Repository Universitas Jember

$$\text{Tahun } 2015 = \frac{751.699.000{,}00}{462.457.671.769{,}93} \; x\; 100\% = 0{,}16$$

$$\text{Tahun } 2016 = \frac{745.212.500{,}00}{524\,955\,111\,848{,}96} \; x\; 100\% = 0{,}14$$

$$\text{Tahun } 2017 = \frac{65.029.000{,}00}{719.105.671.347{,}78} \; x\; 100\% = 0{,}01$$

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 2. Kontribusi Retribusi Terminal Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2006-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Terminal (Rupiah)	Retribusi Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2006	631.148.000,00	25.306.988.809,00	2,49
2007	630.080.300,00	34.630.782.249,00	1,82
2008	614.416.050,00	65.532.047.945,40	0,94
2009	634.819.700,00	77.907.591.239,00	0,81
2010	668.521.650,00	96.564.208.457,00	0,69
2011	623.419.050,00	20.816.368.771,00	2,99
2012	866.546.600,00	40.417.112.857,00	2,14
2013	814.543.500,00	44.192.346.021,00	1,84
2014	819.571.500,00	62.582.757.396,00	1,31
2015	751.699.000,00	34.447.943.109,00	2,18
2016	745.212.500,00	36.311.518.801,00	2,05
2017	65.029.000,00	34.725.389.987,00	0,19

$$P_n = \frac{Realisasi\ Retribusi\ Terminal}{Retribusi\ Daerah}\ x\ 100\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{631.148.000,00}{25.306.988.809,00}\ x\ 100\% = 2,49$$

$$\text{Tahun 2007} = \frac{630.080.300,00}{34.630.782.249,00}\ x\ 100\% = 1,82$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{614.416.050,00}{65.532.047.945,40}\ x\ 100\% = 0,94$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{634.819.700,00}{77.907.591.239,00}\ x\ 100\% = 0,81$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{668.521.650,00}{96.564.208.457,00}\ x\ 100\% = 0,69$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{623.419.050,00}{20.816.368.771,00}\ x\ 100\% = 2,99$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{866.546.600,00}{40.417.112.857,00}\ x\ 100\% = 2,14$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{814.543.500,00}{44.192.346.021,00}\ x\ 100\% = 1,84$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{819.571.500,00}{62.582.757.396,00}\ x\ 100\% = 1,31$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{751.699.000,00}{34.447.943.109,00}\ x\ 100\% = 2,18$$

Digital Repository Universitas Jember

$$\text{Tahun } 2016 = \frac{745.212.500,00}{36.311.518.801,00} \; x \; 100\% = 2,05$$

$$\text{Tahun } 2017 = \frac{65.029.000,00}{34.725.389.987,00} \; x \; 100\% = 0,19$$

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 3. Efektifitas Penerimaan Retribusi Terminal

Tahun Anggaran	Target Retribusi Terminal	Realisasi Retribusi Terminal	Efektifitas (%)	Kriteria Efektifitas
2006	700.000.000,00	631.148.000,00	90,16	Cukup Efektif
2007	630.000.000,00	630.080.300,00	100,01	Efektif
2008	630.000.000,00	614.416.050,00	97,53	Cukup Efektif
2009	630.000.000,00	634.819.700,00	100,77	Cukup Efektif
2010	700.000.000,00	668.521.650,00	95,50	Efektif
2011	649.724.800,00	623.419.050,00	95,95	Cukup Efektif
2012	725.000.000,00	866.546.600,00	119,52	Efektif
2013	835.000.000,00	814.543.500,00	97,55	Cukup Efektif
2014	835.000.000,00	819.571.500,00	98,15	Cukup Efektif
2015	835.000.000,00	751.699.000,00	90,02	Cukup Efektif
2016	835.000.000,00	745.212.500,00	89,25	Cukup Efektif
2017	60.300.000,00	65.029.000,00	107,84	Efektif

$$\text{Efektifitas} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Terminal}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Terminal}\ x\ 100\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{631.148.000,00}{700.000.000,00}\ x\ 100\% = 90,16$$

$$\text{Tahun 2007} = \frac{630.080.300,00}{630.000.000,00}\ x\ 100\% = 100,01$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{614.416.050,00}{630.000.000,00}\ x\ 100\% = 97,53$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{634.819.700,00}{630.000.000,00}\ x\ 100\% = 100,77$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{668.521.650,00}{700.000.000,00}\ x\ 100\% = 95,50$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{623.419.050,00}{649.724.800,00}\ x\ 100\% = 95,95$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{866.546.600,00}{725.000.000,00}\ x\ 100\% = 119,52$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{814.543.500,00}{835.000.000,00}\ x\ 100\% = 97,55$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{819.571.500,00}{835.000.000,00}\ x\ 100\% = 98,15$$

Digital Repository Universitas Jember

$$\text{Tahun 2015} = \frac{751.699.000,00}{835.000.000,00} \; x \; 100\% = 90,02$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{745.212.500,00}{835.000.000,00} \; x \; 100\% = 89,25$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{65.029.000,00}{60.300.000,00} \; x \; 100\% = 107,84$$

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 4. Efisiensi Penerimaan Retribusi Terminal

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan Retribusi Terminal	Realisasi Retribusi Terminal	Efisiensi (%)
2006	35.500.000,00	631.148.000,00	5,62
2007	34.000.000,00	630.080.300,00	5,40
2008	37.000.000,00	614.416.050,00	6,02
2009	48.000.000,00	634.819.700,00	7,56
2010	49.385.000,00	668.521.650,00	7,39
2011	68.000.000,00	623.419.050,00	10,91
2012	71.000.000,00	866.546.600,00	8,19
2013	70.348.500,00	814.543.500,00	8,64
2014	72.210.000,00	819.571.500,00	8,81
2015	79.500.000,00	751.699.000,00	10,58
2016	85.000.000,00	745.212.500,00	11,41
2017	22.300.000,00	65.029.000,00	34,29
Jumlah	649.943.500,00	7.799.977.850,00	90,53
Rata-rata	56.020.291,67	655.417.237,50	10,40

$$\text{Efisiensi} = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Retribusi\ Terminal}{Realisasi\ Peerimaan\ Retribusi\ Terminal}\ x\ 100\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{35.500.000,00}{631.148.000,00}\ x\ 100\% = 5,62$$

$$\text{Tahun 2007} = \frac{34.000.000,00}{630.080.300,00}\ x\ 100\% = 5,40$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{37.000.000,00}{630.000.000,00}\ x\ 100\% = 6,02$$

$$\text{Tahun 2009} = \frac{48.000.000,00}{634.819.700,00}\ x\ 100\% = 7,56$$

$$\text{Tahun 2010} = \frac{49.385.000,00}{668.521.650,00}\ x\ 100\% = 7,39$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{68.000.000,00}{623.419.050,00}\ x\ 100\% = 10,91$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{71.000.000,00}{866.546.600,00}\ x\ 100\% = 8,19$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{70.348.500,00}{814.543.500,00}\ x\ 100\% = 8,64$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{72.210.000,00}{819.571.500,00}\ x\ 100\% = 8,81$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{79.500.000,00}{751.699.000,00}\ x\ 100\% = 10,58$$

Digital Repository Universitas Jember

$$\text{Tahun } 2016 = \frac{85.000.000,00}{745.212.500,00} \; x \; 100\% = 11{,}41$$

$$\text{Tahun } 2017 = \frac{22.300.000,00}{65.029.000,00} \; x \; 100\% = 34{,}29$$